MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 354 TAHUN 2026 TENTANG LAYANAN DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta untuk mendukung keterpaduan layanan digital pemerintah nasional di bidang manajemen aparatur sipil negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
6. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG LAYANAN DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Menetapkan layanan digital terkait tugas dan fungsi pemerintahan di bidang:

a. perumusan dan penetapan kebijakan strategis, serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara; dan
c. perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit,

sebagai Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KEDUA : Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan dasar acuan penyelenggaraan digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk mengoptimalisasi nilai manfaat dan kemudahan bagi pengguna melalui keterpaduan ekosistem Layanan Digital Pemerintah Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KEEMPAT : Ruang lingkup deskripsi Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibatasi pada:

a. siklus hidup pengguna Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara;
b. Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
c. standardisasi antarmuka dan pengalaman pengguna Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara;
d. peta peran kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
e. tahapan pengembangan Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara,

yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikembangkan dan diintegrasikan dalam Portal Layanan Digital Pemerintah secara bertahap, iteratif, dan berkesinambungan, sesuai dengan siklus hidup pengguna Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KEENAM : Penyelenggaraan Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, dengan melibatkan:

a. lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara; dan
b. lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil

Negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

KETUJUH : Pembinaan penerapan Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada:

a. domain arsitektur layanan dan domain arsitektur proses bisnis dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
b. domain arsitektur data dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
c. domain arsitektur aplikasi dan domain arsitektur infrastruktur dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
d. domain arsitektur keamanan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

KEDELAPAN : Domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh dimuat dalam Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan arsitektur terkait pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

KESEMBILAN : Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menerapkan standardisasi antarmuka dan pengalaman pengguna Layanan Digital Pemerintah yang selanjutnya digunakan sebagai model acuan bagi Layanan Digital Pemerintah yang lain.

KESEPULUH : Pemutakhiran terhadap arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan dan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesembilan sebagai dokumen dinamis dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KESEBELAS : Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesepuluh dinyatakan berlaku pada waktu titik simpan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

KEDUA BELAS : Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam dan Diktum Ketujuh mendukung Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peta peran kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KETIGA BELAS : Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku nasional dan diterapkan pada masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT BELAS : Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Belas mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang menyelenggarakan layanan sejenis dengan Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara, secara bertahap sesuai dengan tahapan pengembangan Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KELIMA BELAS : Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam secara bersama-sama melakukan reviu terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan kebijakan mengenai Aparatur Sipil Negara.

KEENAM BELAS : Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan reviu terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan kebijakan mengenai Layanan Digital Pemerintah.

KETUJUH BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 354 TAHUN 2026
TENTANG LAYANAN DIGITAL
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DESKRIPSI LAYANAN DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh, dengan menyediakan layanan digital yang terintegrasi secara nasional. Sejalan dengan amanat tersebut, Layanan Digital Manajemen ASN hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat transformasi pemerintahan melalui pemanfaatan data dan teknologi digital dalam setiap rangkaian proses Manajemen ASN. Adapun digitalisasi Manajemen ASN juga menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dengan demikian, digitalisasi Manajemen ASN tidak hanya mendukung peningkatan kinerja aparatur, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, terpadu, dan berorientasi pada optimalisasi nilai manfaat bagi pengguna.

Kebijakan Layanan Digital Manajemen ASN selaras dengan berbagai regulasi terkait. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional secara konsisten telah menegaskan urgensi penyelenggaraan Layanan Digital Manajemen ASN. Pertama, Perpres 95/2018 dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g mengamanatkan percepatan pembangunan Aplikasi Umum yang mendukung kepegawaian. Kedua, Perpres 132/2022 mengamanatkan layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai salah satu Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional (Inisiatif Strategis nomor 11). Terakhir, Perpres 82/2023 dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, dinyatakan Aplikasi SPBE Prioritas yang diselenggarakan untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian. Dengan demikian, Layanan Digital Manajemen ASN merupakan perwujudan konkret dari amanat tiga peraturan tersebut sebagai layanan *Government to Employee* (G2E).

Secara konseptual, ASN merupakan profesi yang diperuntukkan bagi

negara, bukan hanya bagi instansi pemerintah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan Manajemen ASN secara nasional, sehingga mobilitas talenta dapat dilaksanakan secara efektif, baik dalam satu instansi pemerintah maupun antar-instansi pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Layanan Digital Manajemen ASN yang mampu menyediakan layanan secara terpadu dan *seamless*, menjamin kepastian hak dan kewajiban ASN, serta mendukung pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan berbasis data oleh pimpinan instansi pemerintah.

Berdasarkan UU ASN, kewenangan terkait Manajemen ASN secara nasional diampu oleh beberapa instansi, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dalam praktiknya, layanan digital yang berkaitan dengan siklus hidup ASN diselenggarakan melalui aplikasi yang berbeda-beda. Akibatnya, pegawai ASN selaku pengguna sering kali dihadapkan pada proses yang berulang dan terfragmentasi, sehingga menimbulkan inefisiensi serta menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN secara nasional.

Selain itu, kondisi eksisting menunjukkan bahwa berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah membangun dan mengembangkan aplikasi terkait aparatur negara secara terpisah. Meskipun upaya tersebut dilandasi semangat inovasi dan kebutuhan lokal, secara keseluruhan pendekatan ini telah menimbulkan duplikasi sistem, pemborosan sumber daya, dan rendahnya interoperabilitas antar-instansi pemerintah. Fragmentasi ini menghambat penciptaan ekosistem Manajemen ASN yang efisien dan menyulitkan proses konsolidasi data secara nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk menyatukan berbagai inisiatif tersebut dalam suatu Layanan Digital Manajemen ASN yang terpadu, yang tidak hanya mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga memastikan keterpaduan di seluruh instansi pemerintah.

Lebih jauh, pengembangan Layanan Digital Manajemen ASN diharapkan dapat menjadi contoh konkret keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, yang mengintegrasikan beberapa tugas dan fungsi pemerintahan yang mendukung suatu siklus hidup pengguna layanan dalam satu ekosistem yang utuh. Keberhasilan implementasi Layanan Digital Manajemen ASN akan menunjukkan bagaimana kolaborasi antar-instansi pemerintah dapat diwujudkan dengan berorientasi pada pengguna. Dengan demikian, Layanan Digital Manajemen ASN dapat menjadi model acuan bagi pengembangan Layanan Digital Pemerintah lainnya, demi mencapai keterpaduan Layanan Digital Pemerintah secara nasional yang menyeluruh dan berkesinambungan.

BAB II
SIKLUS HIDUP PENGGUNA LAYANAN DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Siklus hidup pengguna Layanan Digital Manajemen ASN disusun untuk menggambarkan tahapan yang dialami pengguna dalam berinteraksi dengan Layanan Digital Manajemen ASN. Melalui pendekatan ini, Layanan Digital Manajemen ASN dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan pengguna sejak awal hingga akhir proses. Dengan demikian, arah pengembangan Layanan Digital Manajemen ASN tidak hanya berfokus pada penyediaan unsur teknologi, tetapi juga pada bagaimana layanan tersebut digunakan, dirasakan, dan memberi nilai bagi pegawai ASN maupun pengelola kepegawaian. Selain itu, pengembangan Layanan Digital Manajemen ASN juga diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dan dipertukarkan sebagai dasar penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional.

Pendekatan siklus hidup pengguna ini menjadi cara untuk menempatkan sudut pandang pengguna sebagai dasar dalam merancang, mengelola, dan mengembangkan Layanan Digital Manajemen ASN. Pemetaan siklus hidup dilakukan dari dua perspektif utama, yaitu pegawai ASN sebagai penerima layanan dan pengelola kepegawaian sebagai penyedia layanan. Melalui pemahaman atas kedua perspektif ini, setiap tahapan layanan dapat dihubungkan secara lebih utuh, sehingga membentuk alur interaksi yang saling mendukung dan mencerminkan keterpaduan Manajemen ASN dalam satu ekosistem Layanan Digital Pemerintah.

A. Sudut Pandang Pegawai Aparatur Sipil Negara



Gambar 1. Identifikasi Siklus Hidup ASN dalam Sudut Pandang sebagai ASN

Gambaran tersebut merupakan siklus perjalanan ASN sejak tahap awal pendaftaran hingga berhenti dari status ASN, yang mencerminkan keseluruhan proses pengelolaan ASN dalam kerangka transformasi digital pemerintah. Melalui pemetaan siklus ini, setiap tahapan Manajemen ASN dapat diintegrasikan.

1. Mendaftar Menjadi ASN

   Tahapan ini merupakan pintu masuk bagi warga negara untuk menjadi bagian dari ASN. Prosesnya dimulai dari memilih formasi jabatan hingga menerima hasil seleksi. Proses tersebut terdapat pada tahap awal layanan pengadaan.

2. Diangkat Menjadi ASN

   Calon ASN yang lulus seleksi kemudian melalui proses administrasi pengangkatan. Prosesnya dimulai dari pengisian daftar riwayat hidup hingga mendapatkan keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses tersebut terdapat pada tahap akhir layanan pengadaan.

3. Melaporkan Kinerja

   Setelah resmi menjadi ASN, pegawai wajib melaksanakan kinerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan sesuai dengan tujuan organisasi dan melakukan penilaian kinerja secara berkala. Prosesnya dimulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, evaluasi kinerja hingga tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Proses tersebut terdapat pada layanan kinerja.

4. Mengembangkan Kompetensi

   ASN diharuskan terus meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi. Adapun prosesnya dimulai dari pengukuran kompetensi hingga pelaksanaan program pengembangan kompetensi. Proses tersebut terdapat pada layanan pengembangan kompetensi.

5. Mengimplementasikan Budaya Kerja dan Meningkatkan Citra Institusi

   ASN dituntut untuk berkolaborasi lintas instansi dan mengimplementasikan budaya kerja positif untuk membangun citra institusi. Adapun prosesnya seperti internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK serta interaksi dan kolaborasi antar-ASN. Proses tersebut terdapat pada layanan penguatan budaya kerja dan citra institusi.

6. Mengembangkan Talenta dan Karier

   ASN yang telah menunjukkan kinerja baik berkesempatan mengikuti manajemen talenta ASN. Adapun prosesnya meliputi pengembangan talenta dan retensi talenta.

7. Memperoleh Penghargaan dan Pengakuan

   ASN yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan atas kontribusinya. Adapun pemberian penghargaan dan pengakuan meliputi kenaikan pangkat, pemberian gaji dan tunjangan, serta jaminan sosial.

8. Berhenti dari ASN

   Tahap terakhir dari siklus hidup ASN adalah pemberhentian, baik atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri, maupun pemberhentian atas alasan lainnya.

B. Sudut Pandang Pengelola Kepegawaian



Gambar 2. Identifikasi Siklus Hidup ASN dalam Sudut Pandang sebagai Pengelola Kepegawaian

Gambaran tersebut merupakan siklus hidup ASN dari perspektif pengelola kepegawaian, mulai dari perencanaan organisasi hingga pemberhentian ASN. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana pengelola kepegawaian di instansi pemerintah menjalankan fungsi Manajemen ASN secara menyeluruh dan terintegrasi.

1. Menyusun Struktur Organisasi

   Tahap awal dalam siklus pengelolaan ASN adalah menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Tahapan ini menjadi dasar bagi seluruh proses kepegawaian karena menentukan unit kerja, fungsi jabatan, dan kebutuhan pegawai pada instansi. Layanan utama adalah layanan referensi SOTK (unit organisasi).

2. Merancang dan Mengelola Jabatan

   Setelah struktur organisasi ditetapkan, pengelola kepegawaian melakukan pengelolaan jabatan untuk memastikan kesesuaian antara tugas jabatan, kompetensi, dan kinerja ASN. Terdapat beberapa layanan, yakni analisis jabatan, evaluasi jabatan, perancangan jabatan.

3. Merencanakan Kebutuhan Pegawai

   Tahapan ini berfokus pada perencanaan kebutuhan pegawai agar jumlah dan kualifikasi ASN sesuai dengan beban kerja organisasi.

4. Melakukan Pengadaan

   Fase ini merupakan proses rekrutmen ASN melalui seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Adapun pengadaan adalah langkah terakhir dalam upaya akuisisi talenta.

5. Budaya Kerja

   Setelah ASN diangkat, pengelola kepegawaian memiliki tanggung jawab dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik yang sesuai dengan Nilai Dasar BerAKHLAK. Terdapat beberapa layanan, yakni internalisasi nilai dasar, keteladanan dan kepemimpinan, serta dukungan kebijakan.

6. Mengelola Kinerja Pegawai

   Pada tahap ini, pengelola kepegawaian memastikan setiap ASN memiliki sasaran kerja yang jelas serta hasil kerja yang dapat diukur. Terdapat beberapa layanan, yakni perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan evaluasi kinerja.

7. Mengelola Pengembangan Kompetensi

   ASN perlu terus mengembangkan kompetensinya agar dapat beradaptasi dengan dinamika organisasi dan kebutuhan pelayanan publik. Terdapat beberapa layanan, seperti menyusun rencana pengembangan kompetensi instansi, menyediakan layanan pengembangan kompetensi, menyelenggarakan layanan pengembangan kompetensi, dan melakukan evaluasi pengembangan kompetensi.

8. Mengelola Pengembangan Talenta dan Karier

   Tahapan ini berfokus pada pembinaan karier ASN melalui sistem manajemen talenta yang berbasis kinerja dan potensi. Terdapat beberapa layanan, yakni pemetaan, akuisisi, pengembangan, retensi, pemantauan evaluasi, dan talenta nasional.

9. Mengelola Penghargaan dan Pengakuan

   Fase ini mencakup pemberian penghargaan dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan ASN. Terdapat beberapa layanan, yakni kenaikan pangkat, gaji dan tunjangan, serta jaminan sosial.

10. Berhenti dari ASN

    Tahapan akhir dalam siklus pengelolaan kepegawaian adalah proses pemberhentian ASN, baik atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri, maupun alasan lainnya. Untuk pemberhentian atas alasan lainnya terdapat mekanisme pengaktifan kembali status ASN dari kondisi non-aktif.

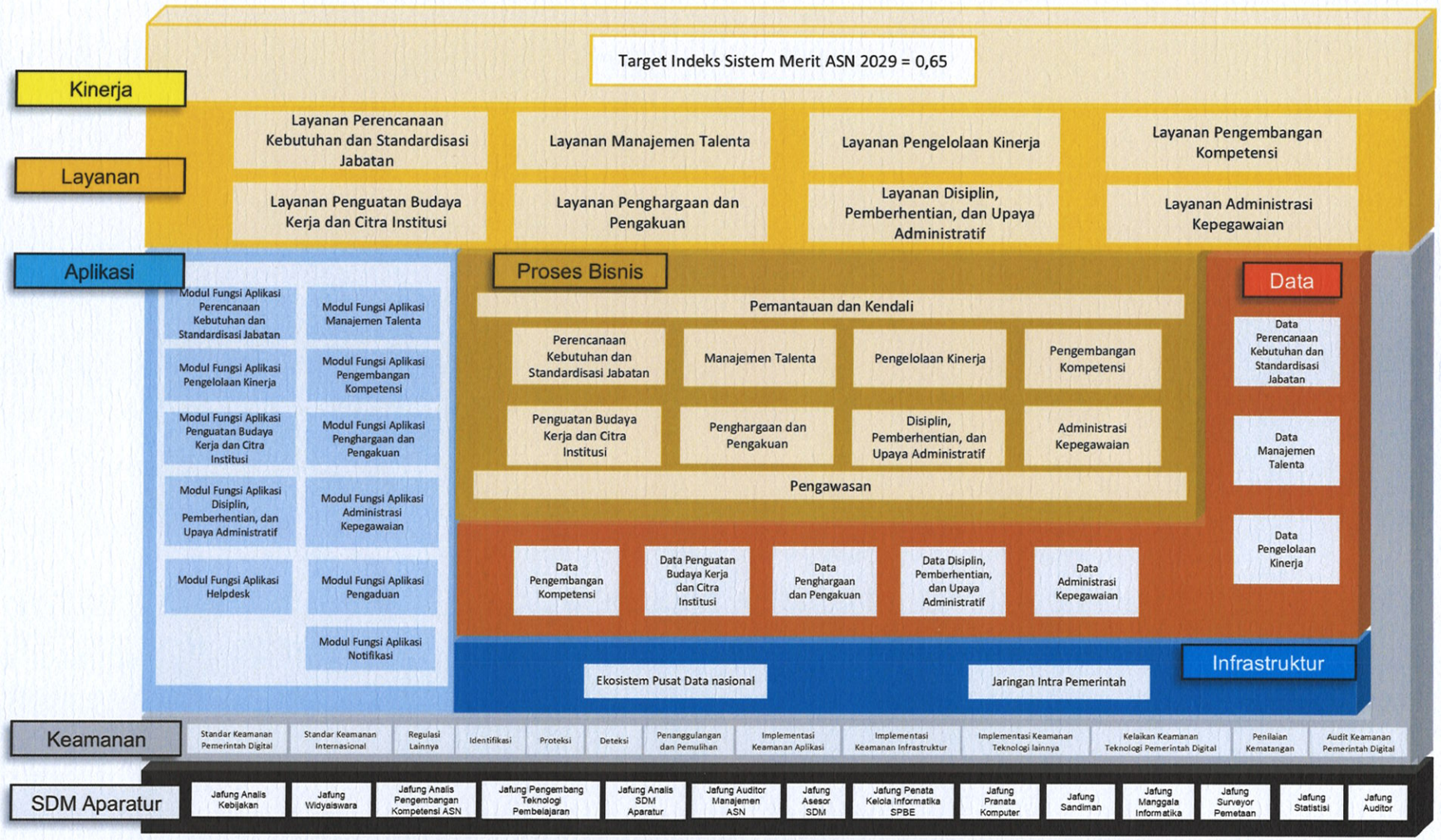
BAB III
ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL
LAYANAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Layanan Digital Pemerintah merupakan keluaran yang dihasilkan dan/atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan data dan teknologi digital untuk memberikan nilai manfaat bagi pengguna layanan, baik masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur, serta pemerintah itu sendiri. Layanan ini menjadi wujud nyata transformasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Untuk menjamin keterpaduan dalam penyelenggaraan layanan digital, disusun Arsitektur Pemerintah Digital, yaitu kerangka dasar yang mendeskripsikan keterhubungan dan keselarasan antar-unsur yang membentuk Ekosistem Pemerintah Digital. Arsitektur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi lintas instansi dalam domain arsitektur layanan, proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan sehingga penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah dapat beroperasi secara terpadu dan konsisten di tingkat nasional dan mendukung pencapaian target kinerja yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam konteks penyelenggaraan layanan Manajemen ASN, Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN menjadi cetak biru integrasi antar-domain arsitektur dalam penyelenggaraan digitalisasi Manajemen ASN untuk mendukung pencapaian target Indeks Sistem Merit ASN sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (RPJMN 2025-2029) serta didukung oleh sumber daya manusia aparatur terkait.

Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN terdiri dari enam domain arsitektur dan dua unsur kelengkapan arsitektur. Enam domain arsitektur terdiri dari domain arsitektur layanan, domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan. Sementara itu, dua unsur kelengkapan arsitektur terdiri dari kinerja dan sumber daya manusia aparatur.



Gambar 3. Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara

A. Kinerja

Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN disusun untuk mendukung pencapaian sasaran "Terwujudnya penyelenggaraan Manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi" sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025–2029. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indeks Sistem Merit, dengan target nasional 0,65 pada tahun 2029. Oleh karena itu, Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN memastikan bahwa setiap penyelenggaraan Layanan Digital Manajemen ASN mendukung penerapan prinsip merit secara konsisten.

B. Domain Arsitektur Layanan

Pencapaian target kinerja diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan yang terstandar dan berkesinambungan. Oleh karena itu, layanan Manajemen ASN disusun dengan memperhatikan siklus hidup pengguna layanan Manajemen ASN baik dari sudut pandang ASN, maupun sudut pandang pengelola kepegawaian, serta kesesuaian dengan ruang lingkup Manajemen ASN.

Domain arsitektur layanan yang digambarkan pada Arsitektur Pemerintah Digital disusun untuk menjawab tantangan fragmentasi layanan dengan menghadirkan sistem yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Melalui pendekatan arsitektur yang terencana, setiap layanan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari layanan terpadu yang mendukung penguatan koordinasi antar-instansi, duplikasi layanan dapat dikurangi, dan efektivitas pelayanan publik dapat meningkat.

Berdasarkan hasil identifikasi domain arsitektur layanan, diperoleh daftar layanan yang mencakup:

1. Layanan Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan;
2. Layanan Manajemen Talenta;
3. Layanan Pengelolaan Kinerja;
4. Layanan Pengembangan Kompetensi;
5. Layanan Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi;
6. Layanan Penghargaan dan Pengakuan;
7. Layanan Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif; dan
8. Layanan Administrasi Kepegawaian.

C. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Penyelenggaraan layanan dilaksanakan melalui proses bisnis yang terstruktur. Dalam konteks Manajemen ASN, proses bisnis dipetakan berdasarkan tugas dan fungsi instansi pengampu layanan. Penyusunan proses bisnis dirancang agar terintegrasi dan menjadi standar proses penyelenggaraan layanan, memperkuat kolaborasi antar-instansi, mengurangi duplikasi proses, dan mendukung penyelenggaraan layanan.

Berdasarkan hasil identifikasi, proses bisnis pada Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN mencakup:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan;
2. Manajemen Talenta;
3. Pengelolaan Kinerja;
4. Pengembangan Kompetensi;
5. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi;
6. Penghargaan dan Pengakuan;
7. Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif;

8. Administrasi Kepegawaian;
9. Pemantauan dan Kendali; dan
10. Pengawasan.

D. Domain Arsitektur Data

Data merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah yang terintegrasi dan mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia. Melalui penerapan Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN, keterpaduan dan interoperabilitas data dapat terwujud secara lebih efektif. Interoperabilitas memungkinkan instansi saling memanfaatkan data yang sama secara efisien, sehingga mengurangi redundansi data dan memastikan setiap instansi memiliki akses terhadap informasi yang mutakhir, konsisten, dan dapat digunakan bersama. Dengan demikian, pertukaran data yang terstandar dan aman akan memperkuat keterpaduan Layanan Digital Manajemen ASN, menjadikannya lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil identifikasi domain arsitektur data, diperoleh daftar data yang mencakup:

1. Data Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan;
2. Data Manajemen Talenta;
3. Data Pengelolaan Kinerja;
4. Data Pengembangan Kompetensi;
5. Data Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi;
6. Data Penghargaan dan Pengakuan;
7. Data Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif; dan
8. Data Administrasi Kepegawaian.

E. Domain Arsitektur Aplikasi

Penyelenggaraan digitalisasi Manajemen ASN membutuhkan aplikasi untuk menyelenggarakan layanan melalui kanal digital. Domain arsitektur aplikasi pada Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN berfungsi untuk memetakan modul fungsi aplikasi yang mendukung penyelenggaraan layanan, sekaligus memastikan pengembangan modul fungsi aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, sehingga mencegah duplikasi dan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis. Dengan demikian, fokus pengembangan diarahkan pada penguatan dan integrasi fungsi aplikasi yang sudah ada guna mewujudkan Layanan Digital Manajemen ASN yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Modul fungsi aplikasi yang diidentifikasi ke dalam domain arsitektur aplikasi pada Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN mencakup:

1. Modul Fungsi Aplikasi Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan;
2. Modul Fungsi Aplikasi Manajemen Talenta;
3. Modul Fungsi Aplikasi Pengelolaan Kinerja;
4. Modul Fungsi Aplikasi Pengembangan Kompetensi;
5. Modul Fungsi Aplikasi Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi;
6. Modul Fungsi Aplikasi Penghargaan dan Pengakuan;
7. Modul Fungsi Aplikasi Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif;
8. Modul Fungsi Aplikasi Administrasi Kepegawaian;

9. Modul Fungsi Aplikasi *Helpdesk*;
10. Modul Fungsi Aplikasi Pengaduan; dan
11. Modul Fungsi Aplikasi Notifikasi.

F. Domain Arsitektur Infrastruktur

Domain arsitektur infrastruktur menjadi fondasi Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN. Infrastruktur mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjelaskan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Domain arsitektur infrastruktur menopang domain arsitektur aplikasi agar penyelenggaraan layanan digital berjalan stabil, serta mendukung domain arsitektur data dalam penyimpanan, pertukaran, dan perlindungan data.

Infrastruktur yang mendukung Layanan Digital Manajemen ASN mencakup:

1. Ekosistem Pusat Data nasional;
2. Jaringan intra pemerintah;

G. Domain Arsitektur Keamanan

Domain arsitektur keamanan dalam Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan pada data, aplikasi, dan infrastruktur. Domain arsitektur keamanan mengintegrasikan pengendalian dan perlindungan keamanan melalui program, penilaian kelaikan, dan regulasi terpadu, sehingga seluruh Layanan Digital Manajemen ASN dapat berjalan aman, andal, dan terpercaya.

Berdasarkan hasil identifikasi domain arsitektur keamanan, diperoleh daftar keamanan yang mencakup:

1. Standar Keamanan Pemerintah Digital;
2. Standar Keamanan Internasional;
3. Regulasi Lainnya:
4. Identifikasi;
5. Proteksi;
6. Deteksi;
7. Penanggulangan dan Pemulihan;
8. Implementasi Keamanan Aplikasi;
9. Implementasi Keamanan Infrastruktur;
10. Implementasi Keamanan Teknologi Lainnya;
11. Kelaikan Keamanan Teknologi Pemerintah Digital;
12. Penilaian Kematangan; dan
13. Audit Keamanan Pemerintah Digital.

H. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia aparatur dalam Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN merupakan unsur yang berperan dalam mendukung penerapan, pengelolaan, dan pengawasan Layanan Digital Manajemen ASN secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Sumber daya manusia aparatur dimaksud mencakup aparatur yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan layanan Manajemen ASN.

Dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, sumber daya manusia aparatur yang terlibat mencakup:

1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara;
3. Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur;
5. Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN;
6. Jabatan Fungsional Asesor SDM;
7. Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE;
8. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
9. Jabatan Fungsional Sandiman;
10. Jabatan Fungsional Manggala Informatika;
11. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
12. Jabatan Fungsional Statistisi;
13. Jabatan Fungsional Auditor; dan
14. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN di atas merupakan acuan dalam penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen dinamis yang dapat dimutakhirkan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN secara lebih detail dapat diakses oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Arsitektur Pemerintah Digital.

BAB IV
STANDARDISASI ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA LAYANAN DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Standardisasi Antarmuka dan Pengalaman Pengguna Layanan Digital Manajemen ASN ditujukan bukan hanya untuk keseragaman visual, melainkan juga untuk mewujudkan keterpaduan tampilan layanan yang konsisten, inklusif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Adapun standardisasi ini mulai diterapkan dari Layanan Digital Manajemen ASN, untuk kemudian diharapkan dapat menjadi percontohan konkret model acuan keterpaduan tampilan bagi Layanan Digital Pemerintah lain yang bersifat lintas instansi. Dengan keterpaduan tampilan yang diharapkan dapat berlaku pada ekosistem Layanan Digital Pemerintah nasional secara menyeluruh, pengguna tidak perlu beradaptasi dan menavigasi ulang dalam setiap pemanfaatan layanan, sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna Layanan Digital Pemerintah.

Standardisasi Antarmuka dan Pengalaman Pengguna Layanan Digital Manajemen ASN terdiri dari prinsip dan panduan desain antarmuka dan pengalaman pengguna, sebagai berikut:

A. Prinsip Desain Antarmuka Pengguna dan Pengalaman Pengguna Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara

Desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna Layanan Digital Manajemen ASN harus dirancang dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Konsistensi
   Setiap elemen desain harus mengikuti pola yang seragam agar pengguna memperoleh pengalaman yang sama di setiap layanan digital. Keseragaman ini mencakup penggunaan jenis huruf, ikon, dan pola interaksi, sehingga setiap layanan tampil sebagai bagian dari satu ekosistem yang terpadu dan mudah dikenali oleh pengguna.
2. Kebergunaan
   Panduan desain yang dibuat harus dapat digunakan dengan mudah oleh tim teknis untuk mengembangkan antarmuka di setiap layanan masing-masing, sehingga proses pengembangan layanan digital dapat lebih efisien, efektif dan terpadu.
3. Skalabilitas
   Setiap elemen desain harus mampu berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan tanpa mengurangi kejelasan tampilan maupun kemudahan penggunaan. Prinsip ini memastikan bahwa layanan digital tetap relevan, efisien, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta kebijakan yang berlaku.
4. Aksesibilitas
   Setiap elemen desain harus memastikan bahwa layanan digital dapat digunakan dan dipahami dengan mudah oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang difabel dan pengguna dengan jenis keterbatasan lainnya. Prinsip ini menegaskan komitmen untuk menyediakan layanan digital yang setara dan inklusif bagi semua pengguna.
5. Kolaborasi
   Setiap elemen desain harus dirancang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang baik, setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan desain, sehingga hasil akhir layanan digital mencerminkan kesatuan arah, yakni berorientasi pada optimalisasi nilai manfaat bagi pengguna.

B. Panduan Desain Antarmuka Pengguna dan Pengalaman Pengguna Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara

Panduan desain merupakan acuan dalam merancang dan mengelola antarmuka dan pengalaman pengguna Layanan Digital Manajemen ASN, yang terdiri atas:

1. Panduan Aksesibilitas

   Panduan aksesibilitas memuat ketentuan yang menjamin agar Layanan Digital Manajemen ASN dapat digunakan oleh semua lapisan penggunanya tanpa pengecualian. Panduan ini memastikan bahwa tampilan, navigasi, dan konten layanan digital dapat diakses oleh penyandang disabilitas, pengguna dengan keterbatasan perangkat atau jaringan, serta pengguna dengan kemampuan literasi digital yang beragam. Dengan demikian, setiap pengguna memiliki kesempatan yang setara untuk memanfaatkan layanan digital secara optimal.

2. Repositori Komponen

   Repositori komponen merupakan kumpulan dari elemen antarmuka yang telah dirancang dan distandarkan untuk digunakan kembali dalam berbagai layanan digital yang dikembangkan. Elemen dalam repositori komponen ini meliputi tombol, *font, accordion, header, footer* dan berbagai komponen antarmuka lainnya. Tujuan utama dari repositori komponen adalah menstandardisasi elemen antarmuka pengguna yang digunakan dalam layanan digital, meminimalkan duplikasi kode, dan upaya berulang dalam pengembangan antarmuka yang sama. Melalui penyediaan repositori komponen diharapkan dapat meningkatkan konsistensi desain dari layanan digital dan membantu percepatan pengembangan layanan digital. Selain itu, penyediaan repositori komponen diharapkan menjadi sumber rujukan bagi seluruh pengembang layanan digital pemerintah guna meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan.

3. Repositori Pola

   Repositori pola memuat kumpulan solusi desain yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tantangan umum dalam membangun interaksi pengguna Layanan Digital Manajemen ASN. Pola-pola ini memberikan panduan praktis bagi perancang dalam membangun alur kerja yang efisien, mudah dipahami, serta keseragaman di seluruh layanan digital. Dengan adanya repositori pola, proses pengembangan dapat berlangsung lebih terarah, dan menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik.

4. Tema

   Tema memuat panduan mengenai gaya visual umum yang digunakan dalam desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna Layanan Digital Manajemen ASN. Penerapan tema bertujuan untuk membangun identitas visual yang seragam, memperkuat citra layanan, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman, jelas, dan mudah dikenali. Selain itu, penerapan tema meningkatkan kenyamanan serta kejelasan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan layanan digital.

5. Fondasi

   Fondasi memuat elemen dasar yang menjadi pijakan dalam membangun tampilan dan interaksi Layanan Digital Manajemen ASN. Penerapan fondasi ini bertujuan untuk memastikan desain layanan digital konsisten, mudah digunakan, dapat dipelihara dengan efisien, dan memenuhi standar kualitas serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna. Elemen-elemen ini mencakup logo, warna, tipografi, dan ikon yang memastikan layanan digital yang selaras dengan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna Layanan Digital Manajemen ASN.

Pelaksanaan Standardisasi Antarmuka dan Pengalaman Pengguna Layanan Digital Manajemen ASN secara rinci merujuk pada kebijakan nasional terkait Standardisasi Antarmuka dan Pengalaman Pengguna Portal Layanan Digital Pemerintah yang memuat Pedoman Sistem Desain Portal Layanan Digital Pemerintah dan Laman Spesifikasi Repositori Sistem Desain Portal Layanan Digital Pemerintah.

BAB V
PETA PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Pemetaan Layanan dan Tata Kerja Layanan Digital Manajemen ASN

Pemetaan layanan dan tata kerja Layanan Digital Manajemen ASN ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan ASN melalui digitalisasi layanan kepegawaian. Secara lebih spesifik, pemetaan layanan dan tata kerja ini bertujuan untuk:

1. mengintegrasikan seluruh layanan dan sub-layanan Manajemen ASN dalam satu platform digital yang terpadu, yaitu Platform Digital Manajemen ASN;
2. memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing Instansi Penanggung Jawab sesuai tugas fungsi, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN);
3. menciptakan tata kelola ASN yang efektif, efisien, dan terintegrasi dengan berdasarkan pada data akurat dan mutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan strategis; dan
4. mewujudkan Manajemen ASN berbasis digital yang mengacu pada sistem merit.

Berikut adalah daftar Layanan Digital Manajemen ASN beserta pembagian tanggung jawab lintas instansi:

Tabel 1. Daftar Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara

Nomor	Daftar Layanan (*To-be*) *(seluruh daftar layanan dan sub-layanan yang direncanakan masuk pada Manajemen ASN)*	Instansi Penanggung Jawab							Instansi Terkait	Klasifikasi Layanan		
		Kebijakan Nasional	Kebijakan Teknis	Proses Bisnis*			Aplikasi	Wali Data		G2G	G2E	G2C
				PANRB	BKN	LAN						
1	Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan											
a	Analisis Jabatan	PANRB	-	✓			PANRB	PANRB	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	✓		
b	Evaluasi Jabatan	PANRB	-	✓			PANRB	PANRB	Instansi Pembina, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah	✓		
c	Perencanaan Kebutuhan ASN	PANRB	-	✓			PANRB	PANRB	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	✓		
d	Perancangan Jabatan	PANRB	-	✓			PANRB	PANRB	Instansi Pembina dan Instansi Teknis	✓		
2	Manajemen Talenta											
a	Pemetaan Talenta	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	✓		
b	Akuisisi Talenta	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	✓		
c	Pengadaan ASN	PANRB	BKN	✓	✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah			✓
d	Pengembangan Talenta	PANRB	BKN dan LAN		✓	✓	BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
e	Retensi Talenta	PANRB	BKN	✓	✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
f	Pemantauan dan Evaluasi	PANRB	BKN	✓	✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	✓		
g	Talenta Nasional	PANRB	-	✓	✓		PANRB	PANRB	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	✓		

Nomor	Daftar Layanan (*To-be*) *(seluruh daftar layanan dan sub-layanan yang direncanakan masuk pada Manajemen ASN)*	Instansi Penanggung Jawab							Instansi Terkait	Klasifikasi Layanan		
		Kebijakan Nasional	Kebijakan Teknis	Proses Bisnis*			Aplikasi	Wali Data		G2G	G2E	G2C
				PANRB	BKN	LAN						
3	Pengelolaan Kinerja											
a	Perencanaan Kinerja	PANRB	-		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
b	Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja	PANRB	-		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
c	Evaluasi Kinerja	PANRB	-		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
d	Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja	PANRB	-		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
4	Pengembangan Kompetensi											
a	Standar Kompetensi Jabatan	PANRB	PANRB	✓			PANRB	PANRB	Instansi Pembina, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah	✓		
b	Pengukuran Kompetensi	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pembina, Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Asesmen yang terakreditasi BKN		✓	
c	Program Pengembangan Kompetensi	PANRB	LAN			✓	LAN	LAN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
5	Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi											
a	Internalisasi Nilai Dasar ASN	PANRB	BKN dan LAN	✓	✓	✓	PANRB	PANRB	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
b	Keteladanan dan Kepemimpinan	PANRB	BKN dan LAN	✓	✓	✓	PANRB	PANRB	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
c	Dukungan Kebijakan	PANRB	BKN dan LAN	✓	✓	✓	PANRB	PANRB	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	✓		

Nomor	Daftar Layanan (*To-be*) *(seluruh daftar layanan dan sub-layanan yang direncanakan masuk pada Manajemen ASN)*	Instansi Penanggung Jawab							Instansi Terkait	Klasifikasi Layanan		
		Kebijakan Nasional	Kebijakan Teknis	Proses Bisnis*			Aplikasi	Wali Data		G2G	G2E	G2C
				PANRB	BKN	LAN						
6	Penghargaan dan Pengakuan											
a	Kenaikan Pangkat	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
b	Gaji dan Tunjangan	PANRB	-	✓	✓		BKN	BKN	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah		✓	
c	Jaminan Sosial	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
7	Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif											
a	Pembinaan dan Penegakan Disiplin	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
b	Pemberhentian	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
c	Upaya Administratif	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
8	Administrasi Kepegawaian											
a	Layanan Manajemen Data Pegawai	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
b	Layanan Manajemen Presensi dan Jam Kerja	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
c	Layanan Manajemen Izin dan Cuti	PANRB	BKN		✓		BKN	BKN	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		✓	
d	Layanan Pengukuran dan Akreditasi	PANRB	BKN dan LAN	✓	✓	✓	BKN, LAN, dan PANRB	BKN, LAN, dan PANRB	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	✓	✓	

**Instansi Penanggung Jawab Proses Bisnis adalah pihak yang menjalankan sekumpulan aktivitas pemerintahan yang terstruktur dan saling terkait untuk mendukung Layanan Pemerintah dan/atau pihak yang bertanggung jawab dalam membuat/memetakan proses bisnis.*

B. Peran Instansi Pengampu Pemerintah Digital

Dalam rangka memastikan implementasi yang terstruktur dan terintegrasi dalam Layanan Digital Manajemen ASN, telah ditetapkan pembagian peran dan tanggung jawab Instansi Pengampu Pemerintah Digital, dengan rincian peran sebagai berikut:

Tabel 2. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab
Instansi Pengampu Pemerintah Digital

No	Instansi Pengampu Pemerintah Digital	Peran
1.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	a. Penetapan Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN; b. Penetapan domain arsitektur layanan dan domain arsitektur proses bisnis pada Layanan Digital Manajemen ASN; c. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN; d. Penetapan Layanan Digital Manajemen ASN; dan e. Koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi pemantauan dan evaluasi Layanan Digital Manajemen ASN.
2.	Kementerian Komunikasi dan Digital	a. Penetapan domain arsitektur aplikasi dan domain arsitektur infrastruktur dalam penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN; b. Pemberian pertimbangan kelaikan interoperabilitas data, aplikasi, infrastruktur dan layanan pada Layanan Digital Manajemen ASN; c. Koordinasi dan sinkronisasi interoperabilitas data, aplikasi, dan infrastruktur pada Layanan Digital Manajemen ASN; dan d. Koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan kapasitas pusat data nasional untuk Layanan Digital Manajemen ASN.

No	Instansi Pengampu Pemerintah Digital	Peran
3.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	a. Penetapan domain arsitektur data dalam penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN; b. Pemberian pertimbangan kelaikan data pada Layanan Digital Manajemen ASN; c. Koordinasi dan sinkronisasi interoperabilitas data pada Layanan Digital Manajemen ASN; dan d. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tata kelola data pada Layanan Digital Manajemen ASN.
4.	Badan Siber dan Sandi Negara	a. Penetapan domain arsitektur keamanan dalam penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Layanan Manajemen ASN; b. Pemberian pertimbangan kelaikan keamanan data, aplikasi, infrastruktur, dan layanan pada Layanan Digital Manajemen ASN; c. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan keamanan dan penyelesaian permasalahan keamanan pada Layanan Digital Manajemen ASN; dan d. Koordinasi dan sinkronisasi audit keamanan Layanan Digital Manajemen ASN.

BAB VI
TAHAPAN PENGEMBANGAN LAYANAN DIGITAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Tahapan pengembangan Layanan Digital Manajemen ASN disusun dalam langkah-langkah gradual yang terstruktur sesuai dengan periodisasi RPJMN 2025–2029. Pendekatan bertahap ini memastikan bahwa setiap fase pengembangan dibangun dengan fondasi yang kuat, dilengkapi dengan validasi teknologi dan kebijakan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Kementerian PANRB, BKN, LAN, dan instansi pemerintah terkait lainnya. Periode implementasi disusun secara tahunan, yang mencakup kegiatan pengembangan fitur, pemutakhiran data, pengembangan dan adaptasi teknologi digital, serta penguatan keamanan informasi untuk memastikan bahwa Layanan Digital Manajemen ASN tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Berikut adalah tahapan pengembangan Layanan Digital Manajemen ASN:

Tabel 3. Tahapan Pengembangan Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara

Tahun	Fase Implementasi	No	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab
2026	Penguatan Kebijakan dan Implementasi Keterpaduan Layanan Digital Manajemen ASN	1	Proses pembentukan kebijakan tentang Manajemen ASN sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ASN	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN dan LAN
		2	Proses pembentukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: Komdigi, Kemen PPN/ Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, BSSN, dan BRIN
		3	Penetapan dasar hukum Layanan Digital Manajemen ASN	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Komdigi, Kemen PPN/ Bappenas, dan BSSN
		4	Pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Kemen PPN/Bappenas, BSSN, dan BPKP
		5	Pengembangan *master data* (tahap awal)	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, dan BSSN

Tahun	Fase Implementasi	No	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab
		6	Pemanfaatan Identitas Digital (tahap awal)	1. Aktor Utama: Komdigi, Kemendagri, dan BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		7	Pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah (tahap awal)	1. Aktor Utama: Komdigi 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		8	Pemanfaatan teknologi mutakhir (tahap awal)	1. Aktor Utama: Komdigi 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		9	Implementasi desain antarmuka dan pengalaman pengguna Layanan Digital Manajemen ASN	1. Aktor Utama: PANRB dan Komdigi 2. Aktor Pendukung: BKN dan LAN
		10	Implementasi API *gateway management*	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN dan LAN
		11	Penerapan *secure by design*	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		12	Pengujian keamanan (Uji Penetrasi)	1. Aktor Utama: BSSN, 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		13	Audit Keamanan	1. Aktor Utama: BSSN, 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
2027	Interoperabilitas Data dan Integrasi Aplikasi – Sistem Penghubung Layanan Instansi	1	Pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Kemen PPN/ Bappenas, BSSN, dan BPKP
		2	Ruang Inovasi Pemerintah Digital untuk Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah

Tahun	Fase Implementasi	No	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab
			Layanan Digital Manajemen ASN	
		3	Evaluasi dan harmonisasi implementasi *master data*	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, dan BSSN
		4	Pemanfaatan Identitas Digital (secara optimal)	1. Aktor Utama: Komdigi, Kemendagri, dan BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, LAN, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah
		5	Pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah (secara optimal)	1. Aktor Utama: Komdigi 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		6	Pemanfaatan teknologi mutakhir (secara optimal)	1. Aktor Utama: Komdigi 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		7	Integrasi dan interoperabilitas dalam satu ekosistem Layanan Digital Manajemen ASN	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN dan LAN
		8	Penerapan *secure by design*	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		9	Pengujian keamanan (Uji Penetrasi)	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		10	Audit Keamanan	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN

Tahun	Fase Implementasi	No	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab
2028	Pemanfaatan Bertahap Layanan Digital Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah	1	Pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Kemen PPN/Bappenas, BSSN, dan BPKP
		2	Orientasi beberapa instansi pemerintah sebagai *pilot*	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah
		3	Penjaringan umpan balik dari pengguna	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah
		4	Pengaturan masa transisi, migrasi, dan terminasi aplikasi sejenis	1. Aktor Utama: PANRB dan Komdigi 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah
		5	Penerapan *secure by design*	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		6	Pengujian keamanan (Uji Penetrasi)	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		7	Audit Keamanan	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
2029	Optimalisasi Layanan Digital Manajemen ASN sesuai Kebutuhan Pengguna	1	Pelaksanaan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Kemen PPN/Bappenas, BSSN, dan BPKP
		2	Implementasi penuh Layanan Digital Manajemen ASN	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Instansi

Tahun	Fase Implementasi	No	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab
			terpadu ke seluruh Instansi Pemerintah	Pusat, dan Pemerintah Daerah
		3	Operasional satu ekosistem Layanan Digital Manajemen ASN terpadu	1. Aktor Utama: PANRB 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah
		4	Penerapan *secure by design*	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN,dan LAN
		5	Pengujian keamanan (Uji Penetrasi)	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		6	Audit Keamanan	1. Aktor Utama: BSSN 2. Aktor Pendukung: PANRB, BKN, dan LAN
		7	Terminasi aplikasi sejenis yang tidak memenuhi kriteria tertentu	1. Aktor Utama: PANRB dan Komdigi 2. Aktor Pendukung: BKN, LAN, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah

BAB VII
PENUTUP

Penetapan Layanan Digital Manajemen ASN dimaksudkan sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan digitalisasi Manajemen ASN melalui ekosistem Layanan Digital Pemerintah yang terpadu dan berkesinambungan. Layanan Digital Manajemen ASN bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi proses serta pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN; mendukung pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional melalui penyelenggaraan transformasi pemerintahan berbasis teknologi digital; serta mewujudkan ekosistem Layanan Digital Pemerintah yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lebih dari sekadar instrumen digitalisasi, pengembangan Layanan Digital Manajemen ASN diharapkan menjadi contoh konkret keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. Melalui integrasi berbagai tugas dan fungsi pemerintahan dalam satu ekosistem yang utuh, implementasi Layanan Digital Manajemen ASN akan memperlihatkan bagaimana kolaborasi antar-instansi dapat diwujudkan secara efektif dan berorientasi pada pengguna. Dengan demikian, Layanan Digital Manajemen ASN dapat berperan sebagai model acuan dalam pengembangan Layanan Digital Pemerintah lainnya, guna mendorong terwujudnya keterpaduan Layanan Digital Pemerintah secara nasional yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi tata kelola pemerintahan yang modern.

Keberhasilan implementasi Layanan Digital Manajemen ASN sangat bergantung pada kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi antar-instansi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen yang digunakan dalam penyelenggaraan Manajemen ASN dapat saling terhubung secara efektif dalam satu kerangka Ekosistem Pemerintah Digital nasional. Melalui penerapan layanan ini, diharapkan terwujud birokrasi yang profesional, responsif, dan berbasis data, yang pada akhirnya mendukung agenda transformasi digital nasional serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI